



## **KETIMPANGAN PENDIDIKAN DI INDONESIA: STUDI KEBIJAKAN DAN EVALUASI INOVASI UNTUK MENJEMBATANI PERBEDAAN KELAS SOSIAL**

*EDUCATIONAL INEQUALITY IN INDONESIA: A POLICY STUDY AND EVALUATION OF INNOVATIONS TO BRIDGE SOCIAL CLASS DIFFERENCES*

**Melyana R Pugu<sup>1\*</sup>, Elmiwati<sup>2</sup>, Rukimin<sup>3</sup>**

Universitas Cenderawasih, Indonesia<sup>1</sup>, Institut Agama Islam Miftahul Ulum Tanjungpinang, Indonesia<sup>2</sup>,  
Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia<sup>3</sup>

**Email:** puguratana@yahoo.com<sup>1\*</sup>, elmiwati@staimutanjungpinang.ac.id<sup>2</sup>, rukiminruki600@gmail.com<sup>3</sup>

### **ABSTRAK**

Ketimpangan pendidikan di Indonesia masih menjadi isu krusial yang menghambat pemerataan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ketimpangan pendidikan serta mengevaluasi efektivitas kebijakan dan inovasi yang telah diimplementasikan pemerintah dalam menjembatani perbedaan kelas sosial. Dengan menggunakan metode kajian pustaka, penelitian ini menelaah berbagai literatur, dokumen kebijakan, dan hasil riset terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan dipengaruhi oleh disparitas ekonomi, geografis, kualitas tenaga pendidik, serta akses terhadap fasilitas pendidikan. Berbagai kebijakan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), zonasi sekolah, dan digitalisasi pendidikan telah memberikan dampak positif, namun masih menghadapi tantangan dalam pemerataan akses dan kualitas. Diperlukan sinergi lintas sektor, penguatan implementasi kebijakan afirmatif, serta inovasi berkelanjutan agar ketimpangan pendidikan di Indonesia dapat ditekan secara signifikan.

**Kata kunci:** Ketimpangan pendidikan, kebijakan pendidikan, inovasi, kelas sosial.

### **ABSTRACT**

*Educational inequality in Indonesia remains a crucial issue that hinders the equitable distribution of human resources and national development. This study aims to identify the factors causing educational inequality and evaluate the effectiveness of policies and innovations implemented by the government to bridge social class differences. Using a literature review method, this study examines various literature, policy documents, and related research results. The findings reveal that educational inequality is influenced by economic and geographical disparities, the quality of educators, and access to educational facilities. Various policies such as the School Operational Assistance (BOS), the Indonesia Pintar Program (PIP), school zoning, and educational digitalisation have had positive impacts, but still face challenges in ensuring equitable access and quality. Cross-sectoral synergy, strengthening the implementation of affirmative policies, and sustainable innovation are needed to significantly reduce educational inequality in Indonesia.*

**Keywords:** Educational inequality, educational policy, innovation, social class.

### **PENDAHULUAN**

Ketimpangan pendidikan di Indonesia merupakan isu yang telah lama menjadi perhatian berbagai pihak, baik pemerintah, akademisi, maupun masyarakat luas. Ketimpangan ini merujuk pada perbedaan akses, kualitas, dan hasil pendidikan yang diterima oleh individu atau kelompok masyarakat berdasarkan faktor ekonomi,

sosial, geografis, dan budaya. Kondisi ini berdampak langsung pada pembangunan sumber daya manusia dan masa depan bangsa.

Pendidikan seharusnya menjadi hak dasar setiap warga negara dan berfungsi sebagai fondasi utama dalam pembangunan individu serta masyarakat yang berkualitas. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat Indonesia



memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan yang layak (Judijanto & Aslan, 2025); (Purike & Aslan, 2025). Banyak wilayah, khususnya daerah terpencil dan pedesaan, masih menghadapi keterbatasan akses dan fasilitas pendidikan yang memadai (Aslan, 2019).

Salah satu faktor utama penyebab ketimpangan pendidikan adalah perbedaan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Sekolah-sekolah di pedesaan umumnya kekurangan fasilitas, tenaga pengajar berkualitas, serta sumber daya pendidikan lainnya. Hal ini menyebabkan kualitas pendidikan di daerah pedesaan tertinggal dibandingkan dengan daerah perkotaan, sehingga memperlebar jurang ketimpangan antar wilayah (Badan Pusat Statistik, 2024). Selain faktor geografis, aspek ekonomi juga sangat berpengaruh terhadap ketimpangan pendidikan. Banyak keluarga dari kelompok ekonomi rendah yang tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka karena tingginya biaya pendidikan dan minimnya bantuan keuangan. Akibatnya, partisipasi pendidikan di kalangan masyarakat miskin menjadi sangat rendah, dan peluang mereka untuk memperbaiki taraf hidup melalui pendidikan pun semakin terbatas (Khatami, 2025).

Ketimpangan pendidikan juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Rendahnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan, norma budaya yang tidak mendukung pendidikan formal, serta faktor gender masih menjadi tantangan di beberapa daerah. Anak-anak dari keluarga dengan tingkat pendidikan orang tua yang rendah cenderung tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Fauzi, 2022). Kualitas dan ketersediaan tenaga pendidik menjadi faktor penting lainnya. Masih banyak daerah yang

kekurangan guru berkualitas, baik dari segi jumlah maupun kompetensi. Rendahnya kesejahteraan guru juga berdampak pada motivasi dan kualitas pengajaran, terutama di daerah-daerah terpencil. Kondisi ini semakin memperparah ketimpangan kualitas pendidikan antar wilayah (Firmansyah & Aslan, 2025a); (Firmansyah & Aslan, 2025b).

Fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang belum merata turut menjadi penyebab utama ketimpangan. Banyak sekolah di daerah tertinggal yang memiliki bangunan tidak layak pakai, kekurangan buku, laboratorium, dan sarana pendukung lainnya. Minimnya alokasi dana pendidikan dari pemerintah untuk daerah-daerah tertentu memperburuk situasi ini, sehingga pemerataan pendidikan sulit tercapai secara efektif (Bappenas, 2024).

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi ketimpangan pendidikan, seperti program wajib belajar, bantuan operasional sekolah, dan kebijakan zonasi pendidikan. Namun, berbagai program tersebut belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan mengatasi akar permasalahan ketimpangan yang ada (Putri & Rahmawati, 2024). Ketimpangan masih dirasakan terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari jangkauan pemerintah pusat. Ketimpangan pendidikan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kemajuan sosial dan ekonomi bangsa. Pendidikan yang tidak merata menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia, produktivitas yang rendah, dan pada akhirnya memperlebar kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Hal ini menjadi tantangan besar dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan (Hasan, 2018).

Menurut teori struktural fungsional, ketimpangan pendidikan dapat terjadi akibat



sistem sosial yang belum mampu menyediakan kesempatan dan sumber daya secara adil kepada seluruh anggotanya. Faktor-faktor seperti pendanaan pendidikan yang tidak memadai, sistem pendidikan yang kurang efektif, dan ketidaksesuaian kurikulum dengan kebutuhan masyarakat menjadi penyebab utama ketimpangan tersebut (Judijanto, 2024). Inovasi dan kebijakan pendidikan berbasis pemerataan menjadi sangat penting untuk menjembatani perbedaan kelas sosial. Digitalisasi pendidikan, penguatan peran guru, serta pemberian bantuan afirmatif kepada kelompok rentan merupakan beberapa solusi yang mulai dikembangkan. Namun, efektivitas inovasi tersebut masih perlu dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan dampaknya terhadap pengurangan ketimpangan Pendidikan (Rokhmawati et al., 2025).

Penelitian ini akan mengkaji berbagai literatur, kebijakan, dan inovasi pendidikan yang telah diterapkan di Indonesia dalam upaya mengatasi ketimpangan pendidikan. Fokus penelitian diarahkan pada identifikasi faktor penyebab, evaluasi kebijakan, serta analisis inovasi yang dapat menjembatani perbedaan kelas sosial melalui pendidikan. Dengan memahami akar permasalahan dan efektivitas kebijakan serta inovasi yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam upaya mewujudkan pendidikan yang lebih adil, merata, dan inklusif di Indonesia.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kajian pustaka (literature review), yaitu dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis

berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dokumen kebijakan pemerintah, serta artikel terkait isu ketimpangan pendidikan di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada identifikasi faktor penyebab ketimpangan, evaluasi kebijakan yang telah diterapkan, serta analisis inovasi pendidikan yang bertujuan menjembatani perbedaan kelas sosial, dengan tujuan memperoleh pemahaman komprehensif dan rekomendasi berbasis bukti untuk perbaikan kebijakan pendidikan di masa mendatang (Eliyah & Aslan, 2025); (Cronin et al., 2008).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor Penyebab Ketimpangan Pendidikan Di Indonesia**

Faktor penyebab ketimpangan pendidikan di Indonesia sangat kompleks dan saling berkaitan, melibatkan aspek ekonomi, sosial, budaya, geografis, hingga kebijakan pemerintah. Salah satu faktor utama ketimpangan pendidikan di Indonesia adalah rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Banyak sekolah, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, tidak memiliki fasilitas yang memadai seperti perpustakaan, laboratorium, ruang kelas yang layak, dan akses teknologi. Kondisi ini sangat mempengaruhi kualitas pembelajaran yang diterima siswa dan memperlebar jurang antara sekolah di perkotaan dan pedesaan (Fauzi, 2022).

Kualitas tenaga pendidik juga menjadi penyebab signifikan. Banyak guru di Indonesia, khususnya di daerah terpencil, belum memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai. Kurangnya pelatihan, pengembangan profesional, serta rendahnya insentif dan kesejahteraan guru membuat motivasi dan kualitas pengajaran menjadi rendah, sehingga berdampak pada mutu



pendidikan yang diterima siswa (Anwar, 2022). Faktor ekonomi keluarga sangat menentukan akses dan kualitas pendidikan yang bisa diperoleh anak-anak. Anak-anak dari keluarga miskin seringkali kesulitan membayar biaya sekolah, membeli buku, seragam, atau membiayai transportasi ke sekolah. Hal ini menyebabkan banyak anak dari keluarga kurang mampu terpaksa putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi (Caroline & Aslan, 2025); (Saputra et al., 2024).

Disparitas geografis antara wilayah perkotaan dan pedesaan juga menjadi penyebab utama ketimpangan pendidikan. Daerah terpencil seringkali kekurangan fasilitas pendidikan, infrastruktur, dan tenaga pengajar yang berkualitas. Jarak tempuh yang jauh dan sulitnya akses transportasi membuat anak-anak di wilayah ini sulit mendapatkan pendidikan yang layak. Kurangnya infrastruktur pendidikan seperti gedung sekolah yang rusak, minimnya akses internet, dan fasilitas belajar yang tiak memadai memperburuk ketimpangan. Banyak sekolah di daerah tertentu bahkan tidak memiliki fasilitas dasar, sehingga siswa tidak dapat menikmati proses pembelajaran dengan optimal (Dewi, 2023).

Faktor sosial dan budaya juga berperan dalam menciptakan ketimpangan pendidikan. Di beberapa daerah, norma sosial membatasi akses pendidikan bagi kelompok tertentu, seperti perempuan. Masih ada anggapan bahwa pendidikan untuk anak perempuan tidak penting untuk anak laki-laki, sehingga partisipasi pendidikan perempuan menjadi lebih rendah (Daniel & Bahari, 2024). Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan menjadi hambatan tersendiri. Di beberapa komunitas, pendidikan belum dianggap sebagai kebutuhan utama, sehingga anak-anak lebih didorong untuk

bekerja membantu keluarga daripada melanjutkan sekolah (Kementerian Pendidikan, 2022).

Distribusi dan kualitas guru yang belum merata menyebabkan ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah. Daerah perkotaan cenderung memiliki guru dengan kualifikasi lebih baik, sementara daerah terpencil kekurangan guru dan seringkali harus menerima guru dengan kompetensi yang kurang optimal. Kebijakan pendidikan yang belum konsisten dan berbasis kebutuhan lokal juga menjadi faktor penyebab ketimpangan. Implementasi kebijakan seringkali tidak merata dan kurang memperhatikan kondisi serta kebutuhan spesifik daerah, sehingga hasilnya tidak efektif dalam mengatasi ketimpangan (Azizah & dkk., 2023).

Pengelolaan dana pendidikan yang belum transparan dan adil menambah permasalahan. Penyaluran dana yang terhambat, penyalahgunaan anggaran, serta kurangnya pengawasan membuat banyak sekolah tidak mendapatkan dukungan finansial yang cukup untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan di beberapa daerah, terutama untuk pendidikan tinggi, menjadi penghalang bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Selain biaya sekolah, biaya tambahan seperti transportasi, buku, dan perlengkapan sekolah juga menjadi beban berat bagi keluarga miskin (Siregar & Nasution, 2022).

Pengelompokan sekolah berdasarkan standar tertentu (misalnya Sekolah Berstandar Nasional atau Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) memperlebar kesenjangan. Sekolah-sekolah unggulan biasanya hanya dapat diakses oleh siswa dari keluarga mampu, sementara siswa dari keluarga kurang mampu harus puas dengan sekolah yang fasilitas dan mutunya lebih rendah (Sari & Hakim, 2023). Ketimpangan dalam



pendidikan tinggi juga nyata, di mana perguruan tinggi berkualitas lebih banyak terpusat di pulau Jawa. Siswa dari daerah luar Jawa menghadapi kendala akses dan biaya untuk melanjutkan pendidikan tinggi, sehingga kesenjangan pengetahuan dan kesempatan semakin lebar (Lestari & Pratama, 2021).

Terakhir, kurangnya program afirmasi dan intervensi khusus untuk kelompok rentan seperti anak-anak difabel, anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, dan masyarakat adat juga memperparah ketimpangan pendidikan. Tanpa intervensi khusus, kelompok-kelompok ini akan terus tertinggal dalam akses dan kualitas pendidikan yang mereka terima (Yuliana & Maulana, 2022).

Dengan demikian, Faktor-faktor di atas saling terkait dan memperkuat satu sama lain, sehingga upaya mengatasi ketimpangan pendidikan di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif, kolaboratif, dan berkelanjutan di seluruh lini kebijakan dan implementasi.

### **Peran Kebijakan Dan Inovasi Pendidikan Dalam Mengurangi Ketimpangan Di Indonesia**

Peran kebijakan dan inovasi pendidikan sangat penting dalam upaya mengurangi ketimpangan di Indonesia, mengingat tantangan besar berupa disparitas akses, kualitas, dan hasil pendidikan antarwilayah serta kelompok sosial ekonomi. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah strategis untuk memastikan hak pendidikan yang setara bagi seluruh warga negara, salah satunya melalui kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang bertujuan mendekatkan akses pendidikan berkualitas ke seluruh lapisan Masyarakat (Lestari & Pratama, 2021).

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) menjadi pilar utama dalam mendukung pembiayaan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, sehingga hambatan ekonomi tidak lagi menjadi penghalang utama untuk mengakses pendidikan. Selain itu, pemerintah juga membangun dan merenovasi sekolah-sekolah di daerah terpencil, serta mengirimkan guru-guru berkualitas melalui program Sekolah Garis Depan guna meningkatkan mutu pendidikan di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) (Yuliana & Maulana, 2022).

Peningkatan kualitas guru menjadi fokus utama, dengan berbagai pelatihan dan pengembangan profesional yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, terutama di daerah-daerah yang selama ini tertinggal. Kebijakan afirmasi seperti insentif untuk guru di daerah terpencil dan distribusi guru yang lebih merata juga diimplementasikan untuk mengurangi kesenjangan kualitas pengajaran antarwilayah. Inovasi pendidikan berbasis teknologi semakin diakselerasi, terutama sejak pandemi COVID-19 (Prasetya & Lestari, 2023). Digitalisasi pendidikan melalui platform pembelajaran daring, aplikasi belajar, dan penggunaan internet memungkinkan siswa di daerah terpencil tetap mendapatkan materi pendidikan yang sama dengan siswa di perkotaan. Salah satu terobosan adalah Virtual Teacher Hologram yang memungkinkan pembelajaran interaktif berbasis hologram bagi siswa di daerah sulit akses, sekaligus meningkatkan keterampilan guru setempat (Cahyono & Aslan, 2025).

Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam inovasi pendidikan. Pemerintah, institusi pendidikan, industri, dan masyarakat



sipil bersama-sama mengembangkan program-program yang mendukung transformasi digital, kewirausahaan, dan pendidikan inklusif, seperti program INCLUSI yang didanai Bank Dunia untuk meningkatkan akses teknologi bagi penyandang disabilitas. Kolaborasi ini juga mendorong pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga lulusan pendidikan siap bersaing secara global (Aslan & Rasmita, 2025).

Kebijakan Merdeka Belajar menjadi salah satu inisiatif besar yang menekankan fleksibilitas pembelajaran, proyek berbasis kebutuhan lokal, dan kemandirian guru dalam mengembangkan materi ajar (Astuti et al., 2023). Meskipun menghadapi tantangan infrastruktur dan distribusi guru, program ini membawa harapan besar untuk menciptakan pendidikan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran pendidikan, minimal 20% dari APBN dan APBD, untuk mendukung pembangunan fasilitas pendidikan dan pemerataan akses. Namun, tantangan masih ada dalam hal distribusi anggaran yang belum sepenuhnya merata dan pengawasan penggunaan dana di lapangan (Prasetya & Lestari, 2023).

Selain bantuan finansial, inovasi pendidikan juga menyoroti pengembangan metode pembelajaran yang lebih kreatif dan kontekstual, seperti pembelajaran berbasis proyek dan pemanfaatan teknologi multimedia. Hal ini bertujuan meningkatkan motivasi belajar siswa dan relevansi pendidikan dengan kehidupan nyata. Beasiswa dan bantuan pendidikan dari pemerintah maupun swasta terus diperluas untuk menjangkau lebih banyak anak dari keluarga miskin, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi tanpa terkendala biaya. Bantuan

ini juga mencakup penyediaan alat pendidikan, seragam, dan perlengkapan sekolah (INOVASI, 2022).

Pendidikan inklusif menjadi bagian penting dari kebijakan dan inovasi pendidikan, dengan memastikan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus, perempuan, dan kelompok rentan lainnya mendapatkan hak pendidikan yang setara. Kampanye kesadaran dan pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk menghilangkan diskriminasi dan meningkatkan partisipasi pendidikan dari semua kelompok (Gus Ipul (Saifullah Yusuf), 2025). Kebijakan dan inovasi pendidikan juga diarahkan pada revitalisasi pendidikan nonformal, seperti pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasi, untuk meningkatkan daya saing lulusan dan membuka peluang kerja yang lebih luas, terutama bagi mereka yang tidak dapat melanjutkan pendidikan formal (Ridwan et al., 2024).

Penjaminan mutu pendidikan menjadi bagian integral dari kebijakan pemerintah, dengan penerapan standar nasional pendidikan dan kerangka penjaminan mutu yang ketat untuk memastikan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia dapat terus meningkat (Suharto & Wulandari, 2022).

Upaya mengurangi ketimpangan pendidikan juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta dalam mendukung pembangunan pendidikan, baik melalui CSR, donasi, maupun pengembangan program kemitraan dengan sekolah-sekolah di daerah tertinggal.

Secara keseluruhan, kebijakan dan inovasi pendidikan di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam mengurangi ketimpangan, meskipun tantangan besar masih harus dihadapi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta pemanfaatan teknologi dan



inovasi yang berkelanjutan, menjadi kunci utama untuk mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkualitas dan inklusif di seluruh Indonesia.

## KESIMPULAN

Ketimpangan pendidikan di Indonesia masih menjadi tantangan besar yang berdampak pada ketidakmerataan akses dan kualitas pendidikan antarkelompok sosial, ekonomi, dan wilayah. Faktor-faktor seperti perbedaan pendapatan, kemiskinan, kesenjangan gender, serta disparitas geografis menyebabkan anak-anak di daerah terpencil dan keluarga kurang mampu sulit memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Kondisi ini tidak hanya menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Berbagai kebijakan dan inovasi telah diupayakan pemerintah untuk mengurangi ketimpangan pendidikan, seperti program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah tertinggal, serta pelatihan dan insentif bagi guru di wilayah 3T. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan pendidikan jarak jauh juga mulai dioptimalkan untuk memperluas akses pendidikan, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Namun, efektivitas kebijakan ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal distribusi bantuan, pemerataan fasilitas, dan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Untuk menjembatani perbedaan kelas sosial melalui pendidikan, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, melibatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, serta sektor swasta. Pemerintah

perlu memastikan bahwa kebijakan dan inovasi pendidikan benar-benar menjangkau kelompok paling rentan, memperbaiki distribusi sumber daya, serta meningkatkan kualitas pendidikan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Hanya dengan langkah komprehensif dan kolaboratif, ketimpangan pendidikan dapat ditekan sehingga tercipta sistem pendidikan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S. (2022). Pemerataan Pendidikan: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 8(1), 51–67.
- Aslan. (2019, January 17). *Pergeseran Nilai Di Masyarakat Perbatasan (Studi tentang Pendidikan dan Perubahan Sosial di Desa Temajuk Kalimantan Barat)* [Disertasi dipublikasikan]. <https://idr.uin-antasari.ac.id/10997/>
- Aslan, A., & Rasmita, R. (2025). EXPLORING CHALLENGES AND STRATEGIES IN TEACHING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE TO YOUNG LEARNERS. *International Journal of Teaching and Learning*, 2(11), Article 11.
- Astuti, S. E. P., Aslan, A., & Parni, P. (2023). OPTIMALISASI PERAN GURU DALAM PROSES PEMBELAJARAN KURIKULUM 2013 DI MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA. *SITTAH: Journal of Primary Education*, 4(1), 83–94. <https://doi.org/10.30762/sittah.v4i1.963>
- Atmanegara, W. . (2024). Landasan Pendidikan Dalam Pengembangan Sistem Pendidikan Nasional. *Berajah Journal*, 4(3), 547–562. <https://doi.org/10.47353/bj.v4i3.345>



- Azizah, N. & dkk. (2023). Ketimpangan Sosial dalam Bidang Pendidikan dan Dampaknya. *Motekar: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 5(2), 111–126.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Pendidikan Indonesia 2024*.
- Bappenas. (2024). *Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025–2045*.
- Cahyono, D., & Aslan, A. (2025). THE ROLE AND CHALLENGES OF HONORARY TEACHERS IN THE NATIONAL EDUCATION SYSTEM: A LITERATURE REVIEW. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS*, 3(5), Article 5.
- Caroline, C., & Aslan, A. (2025). Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan melalui Teknologi: Tantangan dan Solusi di Negara Berkembang. *Jurnal Ilmiah Edukatif*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.37567/jie.v11i1.3696>
- Cronin, P., Ryan, F., & Coughlan, M. (2008). Undertaking a Literature Review: A Step-by-Step Approach. *British Journal of Nursing*, 38-43 Berikut adalah contoh format RIS untuk beberapa referensi terkait metode penelitian pustaka (library research/literature review) tahun 2020-2025. Anda dapat menyalin dan menyesuaikan format ini untuk seluruh daftar referensi Anda. Untuk 50 referensi, ulangi pola di bawah ini untuk setiap sumber yang Anda miliki. ``ris.
- Daniel, & Bahari, Y. (2024). Masalah Ketimpangan Pendidikan Indonesia dengan Kajian Struktural Fungsional. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 2670–2680.
- Dewi, R. (2023). Merdeka Belajar di Tengah Ketimpangan: Tantangan dan Harapan. *Foundasia*, 13(1). <https://doi.org/10.21831/foundasia.v13i1.47444>
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Fauzi, R. (2022). Potret Pendidikan di Daerah Terpencil Kampung Menceri Cigudeg Kabupaten Bogor. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(1), 291–300.
- Firmansyah, F., & Aslan, A. (2025a). EFFECTIVENESS OF SPECIAL EDUCATION PROGRAMMES IN PRIMARY SCHOOLS: AN ANALYSIS OF THE LITERATURE. *INJOSEDU: INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND EDUCATION*, 2(2), Article 2.
- Firmansyah, F., & Aslan, A. (2025b). THE RELEVANCE OF STEAM EDUCATION IN PREPARING 21ST CENTURY STUDENTS. *International Journal of Teaching and Learning*, 3(3), Article 3.
- Gus Ipul (Saifullah Yusuf). (2025). *Kebijakan Sekolah Rakyat sebagai Inovasi Pemerataan Pendidikan*. Kementerian Sosial RI.
- Hasan, S. (2018). Pengaruh Latar Belakang Sosial terhadap Kesempatan Pendidikan. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research*, 7(2), 1216–1227.
- Huda, N. . (2021). Implementasi Pendidikan Karakter Selama Learning From Home Di Sekolah Dasar. *Berajah Journal*, 1(3), 111–116. <https://doi.org/10.47353/bj.v1i3.29>
- INOVASI. (2022). *Ketimpangan Mutu dan Akses Pendidikan di Indonesia: Potret Berdasarkan Survei PISA 2015*. INA-Rxiv. <https://doi.org/10.31227/osf.io/k76g3>
- Judijanto, L. (2024). Pengaruh Kebijakan Pendidikan dan Distribusi Pendapatan terhadap Ketimpangan Ekonomi di



- Indonesia. *Sanskara Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 2(03), 178–187. <https://doi.org/10.58812/sek.v2i03.405>
- Kadiyo, K. (2022). Dampak Kemajuan Teknologi Pendidikan Terhadap Perkembangan Kurikulum Di Pesantren. *Berajah Journal*, 2(3), 745–756. <https://doi.org/10.47353/bj.v2i3.288>
- Judijanto, L., & Aslan, A. (2025). ADDRESSING DISPARITIES IN MULTISECTORAL EDUCATION: LEARNING FROM AN INTERNATIONAL LITERATURE REVIEW. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 5(1), Article 1.
- Kementerian Pendidikan, K., Riset, dan Teknologi. (2022). *Laporan Implementasi Kurikulum Merdeka*.
- Khatami, M. Y. (2025). *Sekolah Rakyat 2025: Menjembatani Jurang Ketimpangan Pendidikan*. Kumparan.
- Lestari, D., & Pratama, A. (2021). Ketimpangan Pendidikan dan Mobilitas Sosial di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 14(3), 210–223.
- Prasetya, E., & Lestari, S. (2023). Ketimpangan Pendidikan antara Desa dan Kota. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 15(2), 78–89.
- Purike, E., & Aslan, A. (2025). A COMPARISON OF THE EFFECTIVENESS OF DIGITAL AND TRADITIONAL LEARNING IN DEVELOPING COUNTRIES. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 5(1), Article 1.
- Putri, F., & Rahmawati, D. (2024). Peran Teknologi dalam Mengatasi Ketimpangan Pendidikan di Masa Pandemi. *Jurnal Pendidikan Digital*, 5(1), 88–101.
- Ridwan, R., Aslan, A., & Rona, R. (2024). IMPLEMENTATION OF RECIPROCAL TEACHING MODEL TO IMPROVE STUDENTS' COGNITIVE ABILITY IN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 2 SAMBAS. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND EDUCATION*, 1(7), Article 7.
- Rokhmawati, Z., Aslan, A., & Farchan, A. (2025). Inovasi Teknologi dalam Pendidikan Jarak Jauh: Kajian Literatur. *Jurnal Ilmiah Edukatif*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.37567/jie.v11i1.3735>
- Saputra, H., Usman, S., Sakka, A. R., & Aslan, A. (2024). The Effect Of Using Learning Media On Learning Motivation About Creed and Morals At Mas Ushuluddin Singkawang. *IJGIE (International Journal of Graduate of Islamic Education)*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.37567/ijgie.v6i1.3698>
- Sari, M., & Hakim, L. (2023). Evaluasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Mengurangi Ketimpangan Pendidikan. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 18(2), 157–170.
- Siregar, R., & Nasution, A. (2022). Ketimpangan Pendidikan di Indonesia: Studi Kasus Papua dan NTT. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 27(3), 201–215.
- Suharto, E., & Wulandari, R. (2022). Kebijakan Afirmatif untuk Pemerataan Pendidikan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(2), 99–112.
- Yuliana, S., & Maulana, H. (2022). Ketimpangan Pendidikan dan Kesejahteraan Anak di Indonesia.



*Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 20(2),  
112–125.